

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam aturan ini menyebutkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumber daya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi.

Dan dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Kota Mojokerto menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 berupa ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.



B. Gambaran Umum Inspektorat

1. Struktur Organisasi

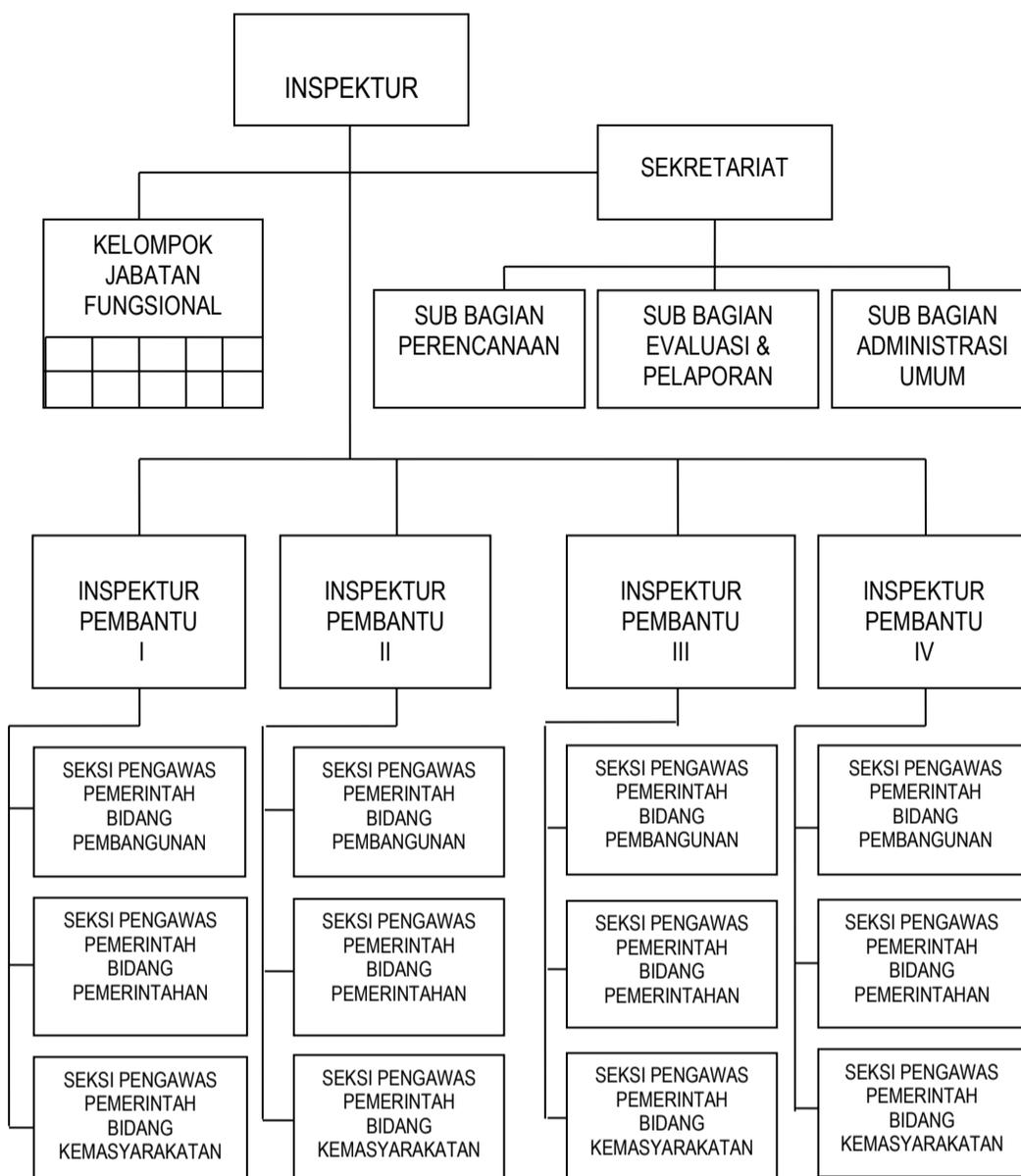
Susunan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto bagian keenam pasal 9 bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.

Struktur organisasi Inspektorat Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Inspektur Pembantu I, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- d. Inspektur Pembantu II, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- e. Inspektur Pembantu III, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- f. Inspektur Pembantu IV, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO
(BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2008)**



2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai pejabat pengawas pemerintah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang :

- a. Administrasi Umum Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan daerah, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah ;
- b. Urusan Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Inspektorat

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya;
- b. Keterbatasan jumlah maupun jenis peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan;
- c. Belum optimalnya penyusunan program anggaran;
- d. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan;
- e. Belum optimalnya implementasi SPIP;
- f. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja;
- g. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- h. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; dan
- i. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.

Munculnya beberapa permasalahan di atas, dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi : kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru, ditambah dengan terbatasnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan peralatan, lemahnya penyusunan program anggaran, kurang memadainya alokasi anggaran penunjang kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Faktor berpengaruh lainnya adalah Satgas SPIP belum seluruhnya memahami SPIP, sedangkan dari faktor eksternal Inspektorat kurangnya konsistensi



Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan SPIP, belum seluruh aparatur mengikuti diklat pengawasan, lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja, kurangnya dukungan lembaga pengawasan fungsional lainnya serta adanya mutasi pegawai yang kurang sesuai antara bidang tugas dengan pendidikan yang diperoleh sebelumnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI DAN MISI

a. Visi

Pengawasan yang Profesional mewujudkan clean and good governance.

b. Misi

Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Inspektorat selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis organisasi yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja



sesuai tugas dan fungsi Inspektorat atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan misi Inspektorat Kota Mojokerto maka tujuan dan sasaran dari Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- Visi : Pengawasan yang Profesional mewujudkan clean and good governance
- Misi : Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel
- Tujuan : Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel
- Sasaran-1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN
- Sasaran-2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- Sasaran-3 : Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan
- Sasaran-4 : Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Inspektorat Kota Mojokerto telah menyusun perjanjian kinerja, yang dijadikan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Mojokerto disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2015 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Tahun 2015.



Ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2015 selengkapnya terdapat pada tabel berikut :

TABEL 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	WTP
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	70 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	> 60
		Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	14 %
3	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	14 %
4	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	70 %
		Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan	90 %

Untuk mencapai sasaran dan target indikator tersebut diatas didukung dengan program dan kegiatan :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - d. Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan di bawahnya
 - e. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan
 - f. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
 - g. Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - *. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan di Inspektorat Kota Mojokerto, maka perlu dilakukan analisis capaian kinerja. Salah satu sarana untuk melakukan analisis yaitu dengan melakukan berbagai perbandingan, yaitu :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional.
5. Melakukan analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Melakukan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Melakukan analisa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Piranti pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Inspektorat menggunakan suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja berisikan sasaran, indikator sasaran, target, realisasi dan persentase pencapaian.

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja yang menyajikan target tahun 2015 dan realisasi indikator sasaran Tahun 2015 sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan	a	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	WTP	WTP	100

	yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	b	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	70 %	81	115
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	> 60	58	96
		b	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	14 %	14 %	100
3	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	a	Tingkat Maturitas SPIP	14 %	14 %	100
4	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	a	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	70 %	90 %	128
		b	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan	90 %	90 %	100

Sasaran Strategis-1 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN.

Untuk mencapai sasaran strategis ini Inspektorat Kota Mojokerto Mengidentifikasi menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD.

Target IKU dimaksud adalah perolehan Opini yang diberikan oleh BPK-RI dengan predikat WTP dan terealisasi memperoleh predikat WTP sehingga diperoleh nilai capaian WTP (100).

Opini WTP diperoleh melalui proses penilaian yang berdasar atas kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektifitas SPI dan Kepatuhan Perundang-undangan.

Sesuai dengan surat dari BPK-RI tanggal 29 Mei 2015 Nomor 208/S-HP/XVIII.SBY/05/2015 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto.



2. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.
Target IKU yang diharapkan adalah penyelesaian atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK yang diselesaikan oleh setiap SKPD sebesar 70% dan terealisasi/diselesaikan oleh seluruh SKPD sebesar 81% sehingga nilai capaiannya adalah 115%.
Penghitungan IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut : Jumlah Tindak Lanjut dengan status selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi temuan BPK dikalikan 100 %.
Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 267 temuan dan 521 rekomendasi. Temuan BPK-RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 420 rekomendasi.

Sasaran Strategis-2 adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Untuk mencapai sasaran strategis-2 ini Inspektorat Kota Mojokerto Mengidentifikasi menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda
Target IKU yang dimaksud adalah perolehan nilai akuntabilitas yang diperoleh Pemerintah Kota.
Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
Dari hasil evaluasi target yang ingin dicapai adalah > 60 terealisasi perolehan Nilai CC (58). Oleh karena itu perolehan capaiannya adalah 96 %.
Rumus penghitungan yang digunakan adalah Nilai Akuntabilitas
2. Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B.
Target IKU yang dimaksud adalah perolehan nilai akuntabilitas yang diperoleh SKPD dalam evaluasi SAKIP.
Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
Dari hasil evaluasi target yang ingin dicapai adalah sebanyak 14 % terealisasi 14 %. Oleh karena itu perolehan capaiannya adalah 100 %.
Rumus penghitungan yang digunakan adalah Nilai Akuntabilitas yang diperoleh SKPD dari hasil Evaluasi SAKIP



Sasaran Strategis-3 adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi di bidang pengawasan.

Untuk mencapai sasaran strategis-3 ini Inspektorat Kota Mojokerto Mengidentifikasi menjadi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Tingkat Maturitas SPIP.

Target IKU yang dimaksud adalah penerapan SPIP pada setiap SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil evaluasi target yang ingin dicapai adalah sebanyak 14 % terealisasi 14 %.. Oleh karena itu perolehan capaiannya adalah 100 %.

Rumus penghitungan yang digunakan adalah Hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor beserta tim terhadap SKPD di wilayah obyek pemeriksaan.

Sasaran Strategis-4 adalah Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi.

Untuk mencapai sasaran strategis ini Inspektorat Kota Mojokerto Mengidentifikasi menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu

Target IKU yang dimaksud adalah Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh auditor beserta Tim yang telah melakukan pemeriksaan pada SKPD baik itu reguler maupun insidental (Riksus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SOP).

Dari hasil evaluasi target yang ingin dicapai adalah sebesar 70 % dan terealisasi 90 %. Oleh karena itu perolehan capaiannya adalah 128 %.

Rumus penghitungan yang digunakan adalah Hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor beserta tim telah diterbitkan LHP.

2. Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan

Target IKU yang dimaksud adalah Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor beserta Tim telah sesuai dengan jadwal dan SPT yang diterbitkan Inspektur baik itu reguler maupun insidental (Riksus).

Dari hasil evaluasi target yang ingin dicapai adalah sebesar 90 % dan terealisasi 90 %. Oleh karena itu perolehan capaiannya adalah 100 %.

Rumus penghitungan yang digunakan adalah Hasil pemeriksaan dan jadwal PKPT (pengawasan yang dilakukan oleh auditor beserta tim).

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
			Th. 2014 (n-1)	Th. 2015 (n)
1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	a Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	WTP	WTP	WTP
	b Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	70 %	55 %	81 %
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	> 60	39	58
	b Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	14 %	3,5 %	14 %
3 Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	a Tingkat Maturitas SPIP	14 %	3,5 %	14 %
4 Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	a Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	70 %	60 %	90 %
	b Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan	90 %	65 %	90 %

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat s.d. akhir periode RENSTRA

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	Tingkat Kemajuan
1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	a Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	WTP	WTP	100
	b Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	80 %	81 %	101

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a	Nlai Akuntabilitas Kinerja Pemda	> 80	58	72
		b	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	100 %	14 %	14
3	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	a	Tingkat Maturitas SPIP	100 %	14 %	14
4	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	a	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	100 %	90 %	90
		b	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan	100 %	90 %	90

Tabel 3.4
Alokasi persasaran pembangunan Inspektorat

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	a	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	417.698.950	43.6
		b	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	87.473.800	9.1
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a	Nlai Akuntabilitas Kinerja Pemda	119.000.000	12.4
		b	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	47.329.500	4.9
3	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	a	Tingkat Maturitas SPIP	186.000.000	19.4

4	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	a	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	-	0
		B	Persentase Pemeriksaan yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	-	0

B. Realisasi Anggaran

Besaran nilai anggaran dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) untuk mewujudkan Kinerja Organisasi Inspektorat disusun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan APBD 2015 dan DPA Perubahan APBD 2015

Berikut ini Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2015 Inspektorat Kota Mojokerto yang akan ditampilkan kedalam bentuk tabel realisasi penyerapan anggaran dari sasaran, program dan kegiatan :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan TA.2015

No	Sasaran	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	954.972.800	783.962.200	83
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	355.109.750	299.725.450	85
		Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	47.329.500	19.460.000	42
		Pengendalian Manajemen +Pelaksanaan Kebijakan KDH	309.093.350	274.11.350	89
		Penanganan kasus Pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya	97.360.800	70.350.100	73
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	39.205.900	31.260.650	80

		Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	48.267.900	39.250.650	82
		Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	108.605.600	79.800.000	74
II	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Teknis tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (APIP)	355.110.950	315.520.000	89
		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	355.110.950	315.520.000	89
Jumlah			1.310.957.800	1.099.482.200	89

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2015 sebesar Rp. 1.099.482.200,00 atau 89,16 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.310.099.482,200 Secara umum realisasi anggaran hampir memenuhi jumlah anggaran atau sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Sedangkan untuk Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 Inspektorat Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran TA.2015

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Tar get	Reali sasi	Capai an	Alo kasi	Reali sasi	Capai an
1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	a Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	WTP	WTP	100 %	417 Jt	369 Jt	88 %
	b Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	70 %	81 %	115 %	87 Jt	70 Jt	80 %

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a	Nlai Akuntabilitas Kinerja Pemda	> 60	58	96 %	119 Jt	121 Jt	85 %
		b	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	14 %	14 %	100 %	47 Jt	19 Jt	42 %
3	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	a	Tingkat Maturitas SPIP	14 %	14 %	100 %	186 Jt	178 Jt	85 %
4	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	a	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	70 %	90 %	128 %	-	-	-
		b	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan	90 %	90 %	100 %	-	-	-

Berikut ini Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 Inspektorat Kota Mojokerto :

Tabel 3.7.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA.2015

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	a	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	100 %	88 %	12
		b	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	115 %	80 %	35
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a	Nlai Akuntabilitas Kinerja Pemda	96 %	85 %	11
		b	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	100 %	42 %	58

3	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	a	Tingkat Maturitas SPIP	100 %	85 %	15
4	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	a	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	128 %	-	128
		b	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan	100 %	-	100

BAB IV PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2015 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang cukup baik sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan kinerja pencapaian sasaran secara umum telah memenuhi apa yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum dan dengan terlaksananya empat sasaran dengan tujuh indikator tercapai keseluruhan dari 7 indikator yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2015 disusun secara obyektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian, di masa mendatang laporan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKIP dapat tercapai dengan lebih baik.

